

**KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN DI TENGAH PANDEMI COVID-**

**19**

(Studi Kasus Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong, Boyolali)



**Oleh:**

**Lilik Nugroho**

**NIM: 18202011004**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Sosial

**MAGISTER KOMUNIKASIDAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAHDAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1382/Un.02/DD/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong, Boyolali)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILIK NUGROHO, S.Sos.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18202011004  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. H. M. Kholili, M.St.  
SIGNED

Valid ID: 63091e7996105



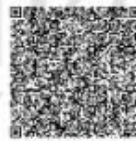
Penguji II  
Dr. Khadiq, S.Ag. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 626a94042736



Penguji III  
Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6309a891186c9



Yogyakarta, 05 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 63091e7996105

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilik Nugroho S. Sos.  
NIM : 18202011004  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Lilik Nugroho, S. Sos.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Komunikasi dan Penyiaran Islam,  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : **Komunikasi Pondok Pesantren di Tengah Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong, Boyolali )**.

Oleh

Nama : Lilik Nugroho, S.Sos.  
NIM : 18202011004  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial. Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022  
Pembimbing



Dr. H. M. Kholili, M. Si

**HALAMAN MOTTO**

**“Kabeh perkoro tumuju marang ridhane Allah SWT”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muchsin dan Ibu Niti Wahyuti
- ❖ Kakak Rini Rahayu
- ❖ Kedua adik Ahmad Aرسال Mu'alim dan Farid Khoirudin
- ❖ Group Hadroh Sekar Langit
- ❖ Teman-teman di Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
- ❖ Almamaterku Tercinta, Fakultas Dakwah dan komunikasi
- ❖ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dua tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia yang akhirnya berdampak pada pendidikan seperti pondok pesantren. Komunikasi dalam pembelajaran ditengah pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melatarbelakangi pondok pesantren Marosatul Qur'an dalam membuat kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah regulasi ataupun strategi yang sengaja dibuat untuk memperlancar jalannya komunikasi, kebijakan komunikasi hadir sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian publik serta untuk mendapatkan tujuan tertentu pada suatu lembaga maupun organisasi. Pondok pesantren Madrosatul Qur'an merupakan lembaga yang mencoba menerapkan komunikasi dalam upaya memepertahankan sistem pembelajaran agar tetap berlangsung, hal ini merupakan wujud kepekaan dan kepedulian pondok pesantren dalam merespon pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat pondok pesantren Madrosatul Qur'an

Penelitian menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, karena permasalahan yang diteliti merupakan suatu yang aktual dan faktual sehingga peneliti mampu mempelajari secara sistematis dan dapat mendiskripsikan sesuai realitas sosial yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

Bentuk komunikasi pondok pesantren Madrosatul Qur'an Boyolali, Jawa Tengah diantaranya adalah kebijakan penjengukan santri, kebijakan dalam penerimaan santri baru, kebijakan liburan dan kedatangan santri, kebijakan dalam khotmil Qur'an, kebijakan sekolah formal, kebijakan hafalan Al-Qur'an, kebijakan sowan kiai. Kemudian, media komunikasi yang digunakan diantaranya adalah surat, brosur, pamplet, whatsapp, instagram, facebook, dan youtube. Faktor pendukung kebijakan komunikasi: faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat kebijakan komunikasi: keterbatasan sarana dan prasarana, alat teknologi dan komunikasi, ketrampilan dalam menggunakan alat-alat elektronik.

**Kata Kunci: Komunikasi, Pondok Pesantren, Pandemi Covid-19**

## ABSTRACT

For more than two years, the Covid-19 pandemic has been affecting the world, which has finally had an impact on education such as Islamic boarding schools. The policy learning during the Covid-19 pandemic that has been set by the government is the background of the Madrosatul Qur'an Islamic boarding school in making policies. Policy is a regulation or strategy that is deliberately made to facilitate the course of communication. Communication policy is available as a substitute for dealing with social issues that are of public interest and for achieving specific objectives in a institution or organization. Madrosatul Qur'an Islamic boarding school are institution that try to implement policies to maintain the learning system so that it continues, this is a form of sensitivity and concern for Islamic boarding schools in responding to the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to find out the policies made by the Madrosatul Qur'an Islamic boarding school.

In this research the writer uses descriptive- qualitative research, because the problem study is an actual and factual so that the researcher can learn systematically and can describe according to existing social reality. In this study, the writer used a variety of data collection methods, participant observation, interviews, and documentation.

The forms of policies on the Madrosatul Qur'an Islamic boarding school in Boyolali, Central Java include the policy of visiting students, policies in the admission of new students, holiday policies and the arrival of students, policies in Qur'an sermons, policies for formal school, Al-Qur'an memorization policies, sowan kiai policies. Then, the communication policy media use to include letters, brochures, pamphlet, whatsapp, instagram, facebook, and youtube. Supporting factors of communication policy: internal and external factors. Factors hindering communication policy: limited facilities and infrastructure, technology and communication tools, technological proficiency.

**Keywords: Communication Policy, Islamic Boarding School, Covid-19 Pandemi**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	...'	Apostrof (tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin
----- <sup>َ</sup>	fathah	A
----- <sub>ِ</sub>	Kasrah	I
----- <sub>ُ</sub>	Dammah	U

Contoh:

كـتـبـا kataba

يـذـهـبـا yaẓhabu

سـئـلـا su'ila

زـكـرـا zūkira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
سَي	fathah ya	dan Ai	A dan i
سَو	fathah wau	dan Au	A dan u

Contoh: كيف - kaifa      هول - haul

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Huruf latin
أ	Ā
إ	Ī
ؤ	Ū

### 4. Ta' Marbūṭah

Transliterasinya untuk ta' Marbūṭah ada dua:

#### a. Ta' Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh: مدينة المنورة - Madīnatul Munawwarah

#### b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: روضة الجنة - rauḍahal-jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا - rabbanā      نعم - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُل - ar-rajul      السَّيِّدَةُ - as-sayyidah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu      الْجَلَالُ - al-jalālu

Jika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang hanya terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شئى – syai’

امرت – umirtu

النوء – an-nau’u

تاخذون – ta’khdūn

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang hilang, maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين – *Wa innallāhalahuwa khair ar-rāziqīn* atau *Wa innallāhalahuwakhairur-rāziqīn*

فأوفوا الكيل والميزان – *Fa’aufūal-kailawaal-mīzāna* atau *Fa’aufūl-kailawal-mīzāna*

### Catatan:

- 1) Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari dan permulaan kalimat. Bilamana dari itu didahului oleh kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول – *wamāMuḥammadunillārasūl*

أفلا يتدبرزن القرآن – *afalāyatadabbarūnaal-qur’ān*

- 2) Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر الله وفتح قريب – *naṣrumminallāhiwafathunqarīb*  
لله الأمر جميعا – *lillāhial-amrujamī'an*  
الله اكبر – *allāh akbar*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, *Allahumma Shalli 'Alaa Sayyidina Wa 'Alaa aali Sayyidina Muhammad*, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang Istiqomah dijalan-Nya.

Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari orang-orang yang sangat berpengaruh. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof.DR. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Prof. DR. Hj. Marhummah, M.Pd., beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Hamdan Daulay, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam.
4. Dosen Pembimbing akademik, Bapak Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum.
5. Dosen pembimbing tesis, Bapak Dr. H. M. Kholili, M. Si. yang telah memberikan waktu, saran-sarannya sebagai wujud perhatian dalam setiap tahapan dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Staf dan Dosen Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan semangat, motivasi dan tunjuk ajarnya.

7. Abah Ulin Nuha Chamdani, pengurus dan para santri pondok pesantren Madrosatul Qur'an Karangjoho, Mojo, Andong, Boyolali yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muchsin dan Ibu Niti Wahyuti, serta kakak Rini Rahayu dan kedua adik Ahmad Arsal Mu'alim dan Farid Khoirudin, yang telah memberikan do'a, motivasi sehingga penelitian tesis ini selesai.
9. Keluarga besar Mahasiswa Magister KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan, mahasiswa angkatan 2018 yang telah memberikan ide-ide dan masukan dalam penelitian tesis ini.

Akhirnya penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung dan tidak langsung, akhir kata, peneliti meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan tesis ini, dan semoga tesis ini akan dapat bermanfaat untuk para pembacanya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2022

Lilik Nugroho

NIM 18202011004



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori .....	13
4. Kerangka Berfikir .....	36
F. Metode Penelitian .....	38
G. Sistematika Pembahasan .....	47
BAB II.....	50
PROFIL PONDOK PESANTREN MADROSATUL QUR’AN BOYOLALI .....	50
A. Deskripsi Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an Andong, Boyolali (PPMQ).....	50
B. Kegiatan Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an Andong.....	67
C. Kurikulum Pondok Madrosatul Qur’an Andong.....	71
D. Tata Tertib Pondok Madrosatul Qur’an Andong .....	79
BAB III.....	81

KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN MADROSATUL QUR'AN.....	81
A. Latar Belakang Komunikasi Ponpes Madrosatul Qur'an Boyolali ...	81
B. Arah Komunikasi Ponpes Madrosatul Qur'an Boyolali .....	84
C. Bentuk Komunikasi Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Boyolali	86
D. Media Komunikasi Ponpes Madrosatul Qur'an Boyolali .....	136
E. Implementasi Komunikasi di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an	141
Boyolali. ....	
F. Perencanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Komunikasi .....	155
G. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Komunikasi	158
Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Boyolali .....	
H. Dampak Pelaksanaan Komunikasi.....	169
BAB IV PENUTUP .....	172
A. Kesimpulan .....	172
B. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA .....	175
LAMPIRAN.....	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	180

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana.....	57
Tabel 2. 2 Struktur Organisasi Kepengurusan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Tahun 2022 .....	59
Tabel 2. 3 Struktur Satgas Jogo Santri Madrosatul Qur'an Tahun 2022 .....	60
Tabel 2. 4 Daftar Ustadz /Ustadzah Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an .....	64
Tabel 2. 5 Jenjang Waktu Penghafalan al-Qur'an.....	74
Tabel 2. 6 Kegiatan Setoran al-Qur'an.....	74
Tabel 3. 1 Jadwal Penjengukan Santri .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir .....	38
Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Boyolali .....	51
Gambar 2. 2 Plakat Pondok Madrosatul Qur'an .....	55
Gambar 2. 3 Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an .....	58
Gambar 2. 4 Jadwal Kegiatan Harian Pondok Madrosatul Qur'an.....	68
Gambar 2. 5 Jadwal Kegiatan Mingguan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an..	69
Gambar 2. 6 Jadwal Kegiatan Setengah Tahunan dan Tahunan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an .....	70
Gambar 2. 7 Jadwal Kegiatan 2 Tahunan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an .	71
Gambar 3. 1 Penjengukan Santri.....	87
Gambar 3. 2 Penitipan Barang Kepada Satgas Jogo Santri.....	88
Gambar 3. 3 Tes seleksi Penerimaan Santri Baru .....	93
Gambar 3. 4 Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Santri .....	99
Gambar 3. 5 Haflah Khotmil Qur'an Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an .....	104
Gambar 3. 6 Prokes dalam Khotmil Qur'an.....	105
Gambar 3. 7 Penerapan Prokes dalam kegiatan Muroja'ah .....	130

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Virus Corona pertama kali menyebar di negara Cina pada bulan Desember 2019, virus Corona atau yang sering kita dengar dengan Covid-19 berkembang sangat cepat dan merebak hampir di seluruh penjuru dunia. Virus ini bermula di kota Wuhan Cina dan pada akhir bulan Maret 2020 telah merebak lebih 200 Negara dengan jumlah korban yang terjangkit di atas 800 ribu jiwa. Pada akhir bulan Januari 2020 lembaga kesehatan dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai wabah, akan tetapi melihat penyebaran yang terus bertambah secara signifikan di seluruh dunia, lalu WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.<sup>1</sup>

Covid-19 yang merebak di dunia dan mulai dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Maret 2020. Dampak dari pandemi ini menyerang berbagai sektor kehidupan, terutama perekonomian negara dan tidak terkecuali sektor pendidikan. Salah satu bentuk transformasi sektor pendidikan akibat dari wabah Corona virus ini adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui jejaring *online*, semisal Google Classroom, Zoom Meeting, hingga Whatsapp.

---

<sup>1</sup> Fajar Junaidi Dkk, *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19* (Yogyakarta : Buku Litera, 2020), 3

Kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi covid-19 mengalami perubahan bentuk dari yang sebelumnya tatap muka langsung menjadi tatap muka melalui media sosial. Keputusan untuk menerapkan kegiatan belajar mengajar dengan cara ini adalah tindak lanjut dari peraturan pemerintah baik dari peraturan presiden hingga kementerian pendidikan, guna mendukung upaya pencegahan penularan wabah.

United Nation Educational Scientific and Cultural (UNESCO) sangat mendukung dan merokomendasikan aplikasi, platform pendidikan yang bisa digunakan baik guru maupun peserta didik guna menjangkau pembelajaran jarak jauh/daring dalam skala besar. Hal ini mengingat bahwa virus Covid-19 ini memiliki dampak pada sektor pendidikan yang cukup signifikan yaitu 290,5 juta dari jumlah pelajar di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Kebijakan yang telah berlangsung saat ini memiliki implikasi dengan pemimpin daerah dan berbagai pimpinan lembaga pendidikan menjadi kepanjangan-tangan pemerintah atau lembaga lain yang bertanggungjawab dalam menanggulangi wabah ini. Tentunya, dari keterlibatan pimpinan lembaga pendidikan ini memiliki peraturan sendiri yang tidak terpisah dari tujuan awal ditetapkannya pembelajaran jarak jauh. Selain itu, hal ini juga merujuk pada bervariatinya kebijakan lembaga pendidikan dalam menentukan bentuk-bentuk komunikasinya dalam mencegah penularan Covid-19, dengan tetap melanggengkan kegiatan belajar mengajar. Hal yang menjadi penting dalam

---

<sup>2</sup> Liputan6.com, "UNESCO: penutupan sekolah akibat covid-19 berdampak pada 290 juta pelajar di dunia". Diakses pada tanggal 17 November 2020 WIB, melalui laman <https://www.liputan6.com/health/read/4195275/unesco-penutupan-sekolah-akibat-covid-19-berdampak-pada-290-juta-pelajar-di-dunia>.

penelitian ini adalah menyoal wewenang setiap lembaga pendidikan yang mampu menentukan bagaimana kegiatan dan proses belajar mengajar itu dilakukan.

Tentunya, hal ini tidak serta merta dilakukan oleh lembaga pendidikan begitu saja. Keputusan ini sendiri berangkat dari beberapa peraturan pemerintah yang dikomunikasikan melalui berbagai medium komunikasi sebagai saluran dalam mentransmisikan pesan-pesan yang berhubungan dengan pencegahan penularan Covid-19. Keputusan tersebut secara resmi berlaku dari Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Secara garis besar peraturan tersebut menerangkan bahwa kegiatan belajar mengajar untuk wilayah yang berada di zona orange dan merah dilarang mengadakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan untuk lembaga pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning masih diperbolehkan mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.<sup>3</sup>

Imbas dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan non-formal seperti halnya pesantren juga memiliki dampak berarti dengan adanya virus tersebut. Tidak sedikit pesantren yang lebih memilih memulangkan santrinya guna mengurangi *madzorat* dari penularan virus ini. Meskipun demikian tidak semua pesantren memiliki kebijakan yang sama. Sejumlah pesantren masih tetap melangsungkan

---

<sup>3</sup>SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21.05 WIB, melalui laman <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/5baf1873d5766d3>.

sistem pengajaran seperti biasa namun juga tetap mematuhi standart protokol pencegahan Covid-19. Salah satunya adalah Pondok pesantren Madrosatul Qur'an. Lembaga ini masih tetap melangsungkan sistem pembelajaran tatap muka. Mengingat bahwa pondok Madrosatul Qur'an masuk dalam katagori pondok tahfidz, sehingga pengasuh pondok mempertimbangkan terjaganya marwah pesantren, terutama bagi santri pengahafal Al-Qur'an.

Dari keputusan diatas, tentunya komunikasi perlu dilakukan dan diterapkan oleh pesantren agar kegiatan sistem pembelajaran masih tetap terlaksana dengan baik dengan tetap memerhatikan aturan pemerintah. Pesantren sendiri menjadi kepanjangan tangan dari segala regulasi peraturan pemerintah dalam mencegah kasus penularan Covid-19.

Komunikasi memiliki arah tindakan serta dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang menjadi perhatian publik. Komunikasi pesantren dalam merespons masalah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem belajar didalamnya. Karena komunikasi mampu dijadikan indikator dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi harus diuraikan secara sistematis berdasarkan realitas sosial yang ada.

Pondok pesantren perlu membuat sebuah komunikasi untuk menyampaikan sebuah gagasan agar pondok pesantren selalu terjaga dan tetap berlangsung tanpa adanya kemungkinan pemerintah untuk menutup pondok secara paksa. Untuk itu, sebuah komunikasi harus mampu menjadi representasi semua peraturan pemerintah terkait pencegahan merebaknya virus Covid-19,



Selanjutnya sebuah kebijakan harus dibuat hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek tidak hanya sekedar formalitas saja.

Melihat kompleksitas permasalahan diatas, ada tantangan tersendiri bagi pesantren untuk memecahkan masalah yang harus dihadapi dan dilakukan dalam pelaksanaan setiap program. Maka dari itu, komunikasi sangatlah vital dan memiliki andil yang sangat besar karena komunikasi juga turut menentukan sebuah citra pondok pesantren dalam merespon dampak dari pandemi Covid-19 ini. Pentingnya komunikasi tersebut harus tetap terjaga karena jika komunikasi tidak terjalin dengan baik maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pesantren dalam menjaga elektabilitas masyarakat maupun pemerintah.

Pondok pesantren Madrosatul Qur'an berusaha menghadirkan sebuah kebijakan dengan tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada diatasnya. Dari semua penjelasan diatas hal tersebut sangatlah menarik untuk diteliti terkait dalam perumusan komunikasi di pondok pesantren yang sudah pasti tentu memiliki cara dan alasan yang kuat sehingga perumusan tersebut sebagai dasar payung hukum pondok pesantren tanpa mengeyampingkan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, komunikasi sangat penting dan aktual untuk diteliti, khususnya di tengah pandemi Covid-19, karena pada hakikatnya komunikasi merupakan bagian integral dari serangkaian opsi yang dapat dipilih oleh pesantren dalam rangka merespon masalah sesuai realitas sosial guna terciptanya suatu kemaslahatan bersama.

Bertolak dari definisi tersebut, maka terdapat berbagai macam kebijakan yang di ambil pesantren dalam merespon pandemi Covid-19 yang di anggap sebagai masalah yang menjadi problematik di pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren hampir di setiap wilayah menetapkan kebijakan dan melakukan sebuah transformasi agar sistem pengajaran masih tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Dengan semua argumen diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi lebih mendalam serta menghasilkan output sebuah rancangan komunikasi yang nantinya akan diformulasikan dan diambil menjadi sebuah regulasi bagi upaya komunikasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana komunikasi Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali di tengah pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi komunikasi di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali tersebut dilakukan?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi komunikasi di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat, diantaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana komunikasi Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali di tengah pandemi Covid-19.

- b. Mengetahui implementasi komunikasi di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali.
- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi komunikasi di Pondok Pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai komunikasi pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali di tengah Covid-19.
- 2) Menjadi acuan atau referensi bagi para mahasiswa yang hendak melakukan penelitian lanjutan tentang komunikasi pesantren.
- 3) Menjadi sebuah informasi tentang pondok pesantren Madrosatul Qur'an sebagai basis *tahfidz*.

### 3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi kontribusi terkait kajian kebijakan komunikasi.

## D. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti sangat membutuhkan tinjauan pustaka dari peneliti terdahulu, hal ini sangat membantu peneliti sebagai salah satu dasar untuk dapat mengidentifikasi dimana letak perbedaan maupun persamaan serta belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu fungsi dari kajian pustaka merupakan kajian terdahulu yang berguna

sebagai panduan maupun acuan peneliliti yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya dari pencarian kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Riza Anggara Putra tahun 2019, dengan judul "Kebijakan Komunikasi Dakwah Lembaga Kursus Bahasa Inggris dan Arab di Pare Kediri". Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan komunikasi dakwah di lembaga kursus bahasa Inggris dan Arab Pare Kediri adalah usaha sadar, sistematis, dan terencana yang dilakukan secara konsisten untuk memberikan nilai-nilai kebaikan dan keIslaman serta akhlak khususnya nilai-nilai Islam seperti (*salimul aqidah, salimul ibadah, matinul khuluq, qodirul ala qolbi, naafi'un lighoirihi*) yang bersumber dari agama dan nilai-nilai keIslaman tersebut dapat menjadikannya sebagai seseorang yang berkepribadian, khususnya berkepribadian Islami sehingga menjadi manusia seutuhnya (insan kamil).

Kebijakan komunikasi dakwah di lembaga kursus bahasa Inggris dan Arab Pare Kediri juga bertujuan untuk membentuk pribadi yang islami mempunyai dasar pegangan agama yang kuat untuk nantinya apabila sudah lulus dari lembaga kursus bahasa Inggris dan Arab Pare Kediri baik belajar maupun bekerja diluar negeri tetap memegang prinsip nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan serta membentengi para siswa maupun lulusan dari dampak negatif kemajuan zaman<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Riza Anggara Putra, *Kebijakan Komunikasi Dakwah Lembaga Kursus Bahasa Inggris dan Arab Pare Kediri*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tujuan yang akan dikaji, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji peristiwa kebijakan komunikasi dakwah dalam memotivasi kepribadian siswa muslim pada lembaga kursus bahasa di Pare Kediri tersebut dilakukan. Sedangkan penelitian dari peneliti sendiri bertujuan untuk mengetahui kebijakan pesantren di tengah wabah Covid-19 di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali. Kemudian untuk persamaanya terletak pada kajiannya yaitu kebijakan komunikasi.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Adul Aziz pada Tahun 2017 dengan judul "Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta"<sup>5</sup>. Hasil dari penelitian tersebut adalah perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren Al-Munawwir komplek Q sudah baik dilakukan dengan pendekatan brainstorming, diawali dengan analisis baik internal maupun eksternal melibatkan partisipasi pengurus, dewan guru, serta perwakilan santri.

Dampak kebijakan penyelenggaraan pendidikan di pondok tersebut menunjukkan perubahan sikap, perilaku serta kemampuan santri. Sedangkan pengurus sebagai pelaksana kebijakan tidak pernah merasa terbebani dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian untuk hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yaitu minimnya kompetensi pelaksana serta fasilitas atau sarana dan prasarana yang

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*, Artikel (Jurnal Tadris, Vol.12 No.2 Desember. 2017), 182

kurang memadai. Adapaun perbedaan yang peneliti lakukan adalah terletak pada kajian, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana kebijakan komunikasi pesantren di tengah wabah Covid-19.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Agusly Irawan aritonang pada tahun 2011 dengan judul “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”<sup>6</sup>. Hasil penelitian tersebut adalah kebijakan komunikasi sebuah perspektif ilmu komunikasi berusaha untuk menawarkan pengetahuan yang pada akhirnya mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk lebih pandai dalam menanggapi sebuah kebijakan yang ada. Kebijakan komunikasi dalam bidang apapun mampu saja dianggap sebagai sebuah pesan (*message/says what*) dari pemerintah (*who*) untuk masyarakat (*to whom*) yang diberikan melalui sosialisasi dengan cara apapun (*in which channel*) dengan efek yang mampu mengigat (*with what effect*).

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tujuan yang akan dikaji, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji peristiwa kebijakan komunikasi pada UU No. 14 tahun 2008 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang keterbukaan informasi lalu kemudian dapat diimplementasikan dan menumbuhkan

---

<sup>6</sup>Agusly Irawan Aritonang, “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”. (Jurnal Komunikasi, Vol. 1 No. 3 Juli 2011), 277

kesadaran masyarakat. Sedangkan penelitian dari peneliti sendiri bertujuan untuk mengetahui kebijakan pesantren di tengah wabah Covid-19 di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali. Kemudian untuk persamaanya terletak pada kajiannya yaitu kebijakan komunikasi.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nurhana Marantika pada tahun 2016 dengan judul “Kebijakan Komunikasi di Madiun (Studi Kasus Pembentukan Perda No.11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Madiun)”.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak sesuai tentang bagaimana prosedur dalam pembuatan naskah akademik Perda No. 11 Tahun 2011, selain itu dalam proses pembuatan Perda ditempuh tanpa mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan, maka terdapat kepentingan politik yang melatar belakangi pendirian LPPL Radar Suara Madiun.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada sebuah kajian, dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengkaji kebijakan komunikasi di Madiun tentang pembentukan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik lokal Suara Madiun yang berusaha melihat proses awal dalam perumusan kebijakan komunikasi. Selanjutnya mencari titik terang tentang bagaimana Pemkot Madiun yang sudah pasti memiliki metode serta alasan tersendiri mengapa Perda tersebut digunakan sebagai kekuatan hukum LPPL Suara Madiun dengan dalih tanpa mengabaikan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan pusat. Dalam hal ini sudah jelas bahwa

---

<sup>7</sup> Nurhana Marantika, “Kebijakan Komunikasi di Madiun : Studi Kasus Pembentukan Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Madiun”. ( Jurnal Komunikasi ETTISAL, Vol. 1 No. 2 2016), 226

penelitian yang akan peneliti teliti memiliki korelasi tentang bagaimana melihat sebuah kebijakan komunikasi, hanya saja penelitian tersebut mengkaji bagaimana sebuah Perda tersebut di terapkan oleh Radar Suara Madiun, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah melihat bagaimana pondok pesantren merumuskan sebuah kebijakan komunikasi di tengah wabah Covid-19 ini.

*Kelima*, buku karya Ana Nanda Abrar dengan judul: “Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek”.<sup>8</sup> Buku yang berisi tentang tujuan kebijakan komunikasi, jenis-jenis kebijakan komunikasi, proses pembuatan kebijakan komunikasi, sumber kebijakan komunikasi yang pada intinya kebijakan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial, politik, dan ekonomi serta selalu memiliki konteks, domain dan paradigma.

Dari lima kajian pustaka yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti menemukan relevansi yang membahas tentang kebijakan komunikasi, adapun perbedaan kajian yang sedang peneliti lakukan dengan tinjauan pustaka adalah terletak pada permasalahan serta jenis kebijakan komunikasi, sehingga tujuan dari penelitian inipun berbeda dengan kajian pustaka yang sudah dijelaskan diatas, namun metode yang dipakai memiliki persamaan yaitu pada metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai kebijakan komunikasi pada pondok pesantren Madrosatul Qura’an Andong Boyolali, bagaimana pondok merespon pandemi Covid-19 dan mampu mempertahankan

---

<sup>8</sup>Ana Nadya Abrar, (*Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakikat dan praktek*). Yogyakarta: Gava Media). 2008, 1



proses belajar tetap berlangsung dengan membuat suatu kebijakan yang mampu menjaga seluruh kondusifitas yang ada didalamnya.

Dari beberapa penelitian-penelitian diatas, penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada bagaimana proses dan implementasi kebijakan komunikasi di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali dalam menghadapi pandemi Covid-19.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam kajian ilmu sosial, teori berfungsi sebagai sebuah panduan yang dapat membimbing pada sebuah pemahaman masalah-masalah sosial. Selain itu Fungsi dari kerangka teori adalah untuk memecahkan sebuah masalah dengan tepat, terarah dan juga sistematis maka dibutuhkan teori-teori yang mendukung, oleh karena itu perlu menyusun kerangka teori sebagai penunjuk bagaimana masalah yang akan disoroti dan dipilih.

Teori-teori dalam komunikasi sangatlah kompleks, bertolak dari kompleksitas kebijakan komunikasi maka kerangka teori yang akan digunakan juga membutuhkan pendekatan multidisipliner. Sehubungan dengan kebijakan komunikasi, maka peneliti menguraikan beberapa teori yang bisa digunakan sebagai pisau analisis terkait kebijakan komunikasi.

### **1. Teori Kebijakan Komunikasi**

Kebijakan komunikasi memiliki pengertian yang sangat beragam dan kompleks. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) yang dirujuk oleh Ugboja memiliki

implikasi bahwa sebuah kebijakan komunikasi merupakan kumpulan dasar-dasar prinsip maupun norma-norma yang sengaja diciptakan untuk memperlancar dan mengatur perilaku dari sistem komunikasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi sengaja diciptakan untuk melancarkan jalannya sistem komunikasi.<sup>9</sup>

Menurut Katharine serta Paula Chakravartty kebijakan komunikasi memiliki tiga bagian penting yaitu konteks, domain dan paradigma. *Pertama*, Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, konteks ini sangat penting bagi kebijakan komunikasi karena menentukan domain kebijakan komunikasi. *Kedua*, domain kebijakan komunikasi yang berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global. *Ketiga*, paradigma berarti kerangka cita-cita yang kepadanya kebijakan komunikasi itu menuju, seperti terbentuknya masyarakat informasi, menguatnya *civil society* dan sebagainya. Secara umum paradigma bisa bertolak dari bagaimana masalah yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan. Dari ketiga aspek kebijakan komunikasi ini perlu diketahui oleh seorang analis kebijakan komunikasi ketika menganalisis sebuah kebijakan komunikasi.<sup>10</sup>

Setiap kebijakan memiliki kriteria tersendiri yang berfungsi sebagai bentuk kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi memiliki lima

---

<sup>9</sup>Ana Nadya Abrar, *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakikat dan Praktek*. (Yogyakarta: Gava Media 2008),3

<sup>10</sup> Ana Nadya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, 4-5

kriteria. Menurut Abrar, kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Kriteria tersebut yaitu:<sup>11</sup>

a. Memiliki tujuan tertentu

Sebuah regulasi, atau kebijakan apapun tentu memiliki sebuah tujuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya setiap kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar jalannya sistem sistem komunikasi. Sederhananya, sebuah kebijakan komunikasi mempunyai arah maupun tujuan yang bisa dilihat dari semua peraturan yang ada.

b. Berisi Tindakan Pejabat Pemerintah atau Lembaga.

Kebijakan komunikasi lahir dari perangkat pemerintahan. Kebijakan komunikasi setingkat UU seperti contoh DPR melakukan pertimbangan ataupun usulan kepada pemerintah. Secara khusus UU membutuhkan perangkat sebuah aturan lebih rendah dibawahnya agar mendapat hasil yang maksimal sesuai dari arah kebijakan komunikasi. Dari contoh tersebut, memiliki arti bahwa kebijakan komunikasi adalah hasil tindakan pemerintah karena produk hukum sendiri dihasilkan dari perangkat daerah.

c. Memperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah

Ketika aparat pemerintahan sudah membuat kebijakan, maka kebijakan tersebut harus mencerminkan apa saja yang akan dijalankan pemerintah. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa kebijakan

---

<sup>11</sup>Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LkiS. 2007), 44

komunikasi tidak menentukan tentang bagaimana proses komunikasi dilakukan. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai mediator setelah adanya kritikan dan keinginan masyarakat untuk dibuatkan sebuah regulasi kebijakan.

d. Bisa bersifat positif atau negatif

Adanya kebijakan komunikasi memiliki kemungkinan bisa bersifat positif maupun negatif. Kebijakan komunikasi dikatakan berhasil jika dapat menjawab semua persoalan yang ada untuk kemudian dapat diterima masyarakat dan mudah untuk dikontekstualisasikan. Namun sebaliknya, jika sebuah kebijakan komunikasi memiliki kepentingan untuk segelintir orang tanpa mengedepankan kepentingan kolektif maka hasil dari kebijakan komunikasi akan menimbulkan stigma negatif dan menghambat tujuan-tujuan yang diharapkan. Terlepas dari hal tersebut, tidak bisa dihindari kalau sebuah kebijakan sudah tentu menuai pro dan kontra.

e. Bersifat memaksa (otoritatif)

Ketika sebuah kebijakan komunikasi sudah ditentukan, maka suka dan tidak suka harus dijalankan/sesuai kebijakan yang telah ada. Jika sebuah kebijakan tidak dilakukan dengan baik dan benar maka terdapat sanksi yang sifatnya mengikat bagi para pelanggar yang keluar dari koridor kebijakan tersebut.

## 2. Perencanaan Kebijakan Komunikasi

Perencanaan komunikasi yang dilakukan dan diterapkan dengan baik turut memberikan keberhasilan program yang nantinya dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Middleton menjelaskan bagaimana sebuah langkah perencanaan komunikasi yang efektif sebagai berikut<sup>12</sup>:

### a. Pengorganisasian data base line dan need assessment

Dalam perencanaan sebuah kebijakan komunikasi pengorganisasian data base line sangatlah urgent untuk dilakukan, karena sebuah perencanaan merupakan bagian integral dalam hal tersebut yang nantinya dapat memberi arah dalam sebuah penelitian. Selanjutnya kegiatan penelitian ini dapat menghasilkan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari masyarakat yang langsung bersinggungan dengan masalah yang dihadapi, data primer tersebut dapat diperoleh dari interview, diskusi, polling dan kegiatan lain yang dapat menunjang sebuah keakuratan data. Sedangkan data sekunder merupakan data untuk pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan rencana pelaksanaan program.

Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai informasi berupa media cetak dan elektronik serta kebijakan-kebijakan yang masih ada korelasinya terhadap program serta dapat menghadirkan sebuah isu-isu strategis yang perlu untuk diperhatikan dalam

---

<sup>12</sup> Hancock, Alan, *Communication Planning for Development: An Operational Frame Work* ( Paris :UNESCO, 1981), 56

pengumpulan data ini. Sedangkan need assessment mendata apa saja yang dibutuhkan dalam semua proses yang akan berlangsung, mendata apapun yang dapat dijadikan dalam program.

b. Perumusan objektive komunikasi

Ketika menentukan sebuah tujuan harus memperhatikan masalah yang muncul untuk kemudian dapat dirumuskan bagaimana masalah sebenarnya setelah program dilakukan. Agar tujuan dapat terlaksana dengan baik dan optimal maka harus jelas, spesifik komprehensif. Selanjutnya objektif dari sebuah program harus terukur dan bisa dijangkau apalgi ketika evaluasi<sup>13</sup>.

c. Pengembangan strategi

Pengembangan strategi merupakan metode yang dirancang dengan efektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan objektif yang ditentukan secara maksimal. Hal ini adalah sebagai dasar taktik yang harus dilakukan dan dibuat ketika berada dilapangan.

d. Analisis dan segmentasi khalayak

Analisis dan segmentasi khalayak merupakan sebuah rangkaian yang harus dilakukan dengan menentukan target program yang telah dilakukan dan dijalankan. Analisis ini merupakan hal sangatlah urgent dikarenakan sebuah perencanaan sangatlah bergantung dengan beragam publik yang ditemui. Dalam

---

<sup>13</sup>Hancock, Alan, *Communication Planning for Development: An Operational Frame Work* (Paris : UNESCO, 1981),62

pemograman komunikasi setidaknya dilakukan dengan selektif serta dapat memilah dan memilih menjadi tiga bagian atau kelompok. Pertama, Laten Publik merupakan sebuah kelompok yang dihadapkan dengan masalah akan tetapi tidak memiliki perhatian lebih. Kedua, Aware Publik merupakan kelompok yang bertanggung jawab penuh terhadap problematik yang ada. Ketiga, Active Publik merupakan kelompok yang berperan melakukan tindakan dalam setiap masalah.

e. Pemilihan media

Media sangatlah berperan penting untuk mengetahui alur komunikasi, adapun dalam pemilihan media dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menulis media yang sudah ada, disini hal yang paling penting adalah mencatat dan mengelompokkan media sesuai fungsi serta kegunaan yang dibutuhkan dalam program komunikasi. Perlu diketahui dalam pemilihan media harus diperhatikan tentang efektifitas, biaya, jangkauan segment dan ketepatan waktu<sup>14</sup>.

f. Mendesain dan mengembangkan pesan

Dalam hal ini pendesainan dan pengembangan pesan harus diperhatikan dengan baik dan benar serta sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan memadukan teori-teori yang ada.

---

<sup>14</sup>Hancock, Alan, *Communication Planning for Development: An Operational Frame Work* ( Paris :UNESCO, 1981), 59

g. Perencanaan management

Perencanaan mangement dapat dirancang dengan memperhatikan job dan deskripsi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas rutin serta menjalankan kerangka-kerangka management secara sistematis. Selain itu harus aktif melakukan monitoring dan koordinasi ketika berada dipangan<sup>15</sup>.

h. Pelaksanaan pelatihan

Pelatihan sangat penting dan sudah menjadi hal pokok dalam kesiapan pelaksanaan program. Karena hal ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kerja secara maksimal sebelum pelaksanaan. Dengan pelatihan ini diharapkan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>16</sup>.

i. Implementasi atau pelaksanaan

Setelah menentukan program yang sudah tersusun maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya sesuai dengan program yang sudah disediakan. Beberapa tahapan yang seringkali dilakukan adalah seperti sosialisasi, silaturahmi bahkan melobby guna menunjang pelaksanaan.

---

<sup>15</sup> Ibid, 63

<sup>16</sup> Ibid, 64



j. Evaluasi program

Evaluasi program sangat berguna dalam setiap kegiatan, karena dengan evaluasi program dapat diketahui apa saja kendala-kendala yang ada dilapangan, sehingga dapat diperbaiki dimana letak kekurangannya. Evaluasi sendiri ada dua macam yaitu evaluasi on going dan end review. Evaluasi on going berguna untuk mengevaluasi berbagai kendala yang ada dilapangan saat kegiatan untuk selanjutnya dapat diperbaiki jika tidak sesuai apa yang sudah direncanakan diawal. Dalam kegiatan apapun evaluasi sangat diperlukan agar dapat melihat kegiatan sebelumnya sebagai tolak ukur seberapa maksimalkah hasil yang sudah dicapai. Sedangkan evaluasi end review adalah semua hal yang mencakup segala evaluasi mulai dari awal sampai akhir sehingga dapat digunakan sebagai batu pijakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya<sup>17</sup>.

Kebijakan sendiri merupakan output dari proses yang sangat panjang. Beragam pendapat muncul dan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan. William N Dunn menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahap pembuatan sebuah kebijakan sebagai berikut<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup>Hancock, Alan, *Communication Planning for Development: An Operational Frame Work* ( Paris :UNESCO, 1981),66

<sup>18</sup>Duun N William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 22.

a. Penyusunan Agenda.

Sebelum kebijakan dibuat dan diterapkan, terlebih dahulu pembuat kebijakan harus membuat dan menyusun agenda untuk selanjutnya menyeleksi bagaimana hambatan-hambatan yang ada korelasinya dengan kebijakan yang akan dibuat. Pada langkah ini masalah dikelompokkan secara selektif untuk kemudian masalah tersebut menjadi fokus pembahasan untuk dipecahkan. Setiap masalah memiliki argumentasi tersendiri. Penting untuk diperhatikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan agenda untuk melihat dengan jeli bagaimana masalah yang benar-benar memiliki relevansi dengan kebijakan agar tepat sasaran dan akurat.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini merupakan sebuah alternatif yang diambil dan dibuat oleh para pejabat maupun pemangku kekuasaan guna mengatasi masalah yang benar-benar dibutuhkan dan penting untuk dijadikan fokus pembahasan. Dilihat dari sudut pandang analisis kebijakan, tahap ini merupakan tahap peramalan. Peramalan ini merupakan pengetahuan yang memiliki relevansi tentang bagaimana membaca masalah yang akan dihadapi selanjutnya setelah dilakukannya alternatif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kamal Fuadi, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta*. Skripsi (Jakarta: universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 14.

c. Adopsi kebijakan.

Dari bermacam-macam banyaknya alternatif yang sudah ditawarkan, selanjutnya akan diambil satu alternatif penyelesaian masalah yang sebelumnya sudah disepakati dan dipakai sebagai solusi dari permasalahan itu sendiri. Tahap adopsi kebijakan ini sering disebut sebagai legitimasi kebijakan (*policy legitimation*) yang memiliki arti sebuah kebijakan yang sudah memperoleh legitimasi. Masalah yang sudah ditetapkan sebagai fokus pembahasan mendapat alternatif pemecahan berupa sebuah kebijakan yang selanjutnya untuk diimplementasikan.

d. Implementasi kebijakan.

Pada tahap implementasi kebijakan inilah sebuah alternatif pemecahan yang sudah dipilih sebelumnya untuk dilakukan. Setiap kebijakan sudah tentu memiliki kelemahan, kelemahan tersebut muncul ketika hasil tidak sesuai yang diharapkan dilapangan. hal inilah yang kemudian disebut sebagai kendala, selanjutnya kendala-kendala yang menghambat tersebut harus diantisipasi sebelumnya agar implementasi kebijakan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

e. Evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini, kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya lalu dievaluasi untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan dibuat mampu menyelesaikan masalah atau tidak.

Evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan evaluasi inilah yang nantinya dapat menjadikan sebuah perubahan sesuai rencana yang diharapkan.

### 3. Pesantren

Terdapat beberapa definisi dan pengertian mengenai pesantren, arti pesantren sangatlah beragam dan kompleks. Menurut Zamskari Dhofier Pesantren sendiri berasal dari kata santri, dengan awalan di depan pe dan akhiran an yang memiliki arti tempat tinggal santri/asrama santri<sup>20</sup>. Menurut beberapa ahli yang dikutip juga oleh Zamskari Dhofier adalah pendapat dari Johns, menurut Johns pesantren sendiri berasal dari kata santri, dan santri sendiri berasal dari bahasa tamil yang memiliki pengertian guru mengaji ataupun guru yang faham tentang ilmu-ilmu agama secara mendalam. Selanjutnya C.C. Breg juga mengemukakan bahwa pesantren berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India memiliki pengertian seseorang yang faham dan tau buku-buku suci maupun sarjana ahli kitab agama Hindu. Sedangkan menurut Tiwari dan M. Chatuverdi memberikan pengertian bahwa kata shasri berasal dari kata shastra yang memiliki arti buku-buku agama, buku-buku suci atau buku-buku ilmu pengetahuan, maka pengertian paling mendasar bahwa pesantren memiliki arti tempat tinggal dan belajar para santri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* ( Jakarta : LP3ES 2015 ), 79.

<sup>21</sup> Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren* (Cet.VI, Jakarta: LP3S, 1994), 18.

Lebih dari itu pesantren juga dapat diartikan sebuah lembaga pendidikan islam yang sejak dulu di anggap sebagai pendidikan asli Indonesai yang sampai saat ini masih tetap eksis dan berkembang. Secara harfiah kata pesantren berasal dari bahasa arab yaitu fuunduq yang memiliki arti penginapan, asrama, tempat tinggal atau wisma sederhana. Karena pondok pesantren memang tempat tinggal semua santri yang jauh dari tempat asalnya<sup>22</sup>.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Nurcholis Madjid dalam bukunya Bilik-bilik pesantren bahwa pondok pesantren merupakan pendidikan tradisional yang ada di indonesia yang berlangsung dan mengakar berabad-abad lamanya. Selain itu Nurcholis juga menjelaskan bahwa pesantren merupakan tempat berkumpulnya para santri untuk mengkaji ilmu-ilmu agama.<sup>23</sup>Sedangkan menurut Mastuhu secara terminologis pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional islam yang didalamnya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama, menghayati, mendalami, memahami serta mengamalkan ajaran islam yang didalamnya menekankan moral sebagai pedoman menjalani hidup sehari-hari.<sup>24</sup>

Abdurrahman Wakhid juga memberikan pengertian bahwa pesantren merupakan sebuah komplek yang terletak dan terpisah dengan kehidupan sekelilingnya. Dalam komplek tersebut terdapat sebuah bangunan mulai dari rumah kediaman pengasuh atau ndalem, mushola

---

<sup>22</sup>Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* (Cet 1, Jakarta: P3M 1986), 99.

<sup>23</sup>Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997), 42.

<sup>24</sup>Hasby Indra, *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komlesitas Global* (Jakarta: IRP Press 2004), 3.

atau masjid dan tempat pengajaran asrama sebagai tempat tinggal para santri<sup>25</sup>.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas bisa disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang di dalamnya terdapat kiai sebagai pemegang otoritas penuh serta para pengurus dan pembenina yang ikut serta memberikan pendidikan kepada para santri untuk belajar, megenal, memahami ilmu agama secara mendalam.

a. Tujuan Pondok Pesantren

Kehadiran pesantren sebagai yayasan pendidikan adat maupun yang telah mengalami perubahan, mempengaruhi eksistensi individu Indonesia. Karena dampaknya yang luar biasa, Kiyai Ali Ma'shum berpendapat bahwa alasan didirikannya sekolah inklusif Islam adalah untuk menciptakan "ulama". Sementara itu, menurut Manfred Ziemek, ia tertarik melihat titik padu padan antara akhlak dan keilmuan, tujuan pesantren adalah membentuk karakter, meneguhkan etika, dan melengkapinya dengan informasi.<sup>26</sup>

Dalam renungan atau sanggar tentang peningkatan pesantren live-in di Jakarta yang terjadi pada tanggal 2-6 Mei 1978, definisi eskalasi sekolah pengalaman hidup Islam direncanakan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1985), 10.

<sup>26</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 62.

### 1) Tujuan Umum

Kehadiran pesantren berarti mendorong warganya untuk memiliki karakter Muslim sesuai ajaran Islam dan menanamkan rasa tegas ini di semua bagian kehidupan mereka dan membuat mereka berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

- a) Menginstruksikan santri-santri daerah setempat agar menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu, berkemampuan dan berakhlak mulia sebagai warga negara pancasila.
- b) Mengajarkan santri untuk menjadikan umat Islam sebagai kerangka peneliti dan pendakwah yang bersungguh-sungguh, pantang menyerah, ekstrim, giat dalam mengkaji sejarah Islam secara menyeluruh dan berdaya.
- c) Mengajar santri untuk memperoleh karakter dan memantapkan jiwa patriotisme sehingga dapat mengembangkan manusia-manusia maju yang dapat mengkonstruksi diri dan bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa dan negara.
- d) Instruksikan pekerja augmentasi untuk perbaikan miniatur (keluarga) dan lokal (negara atau lokal).
- e) Ajari santri untuk menjadi ahli yang berbakat di berbagai bidang kemajuan, terutama perubahan peristiwa mental-dunia lain.
- f) Ajarkan santri untuk membantu bekerja pada bantuan sosial pemerintah daerah alami dalam rangka membina daerah negara.

Mengingat tujuan keseluruhan dan target eksplisit di atas, pencipta dapat beralasan bahwa sekolah live-in Islam dipenuhi dengan informasi yang ketat, namun juga menonjol di berbagai bagian kehidupan. Sekolah pengalaman hidup Islami seharusnya memiliki pilihan untuk menciptakan santri yang berkarakter muslim dan berwawasan luas, cinta tanah air dan negara, sehingga santri menjalankan kewajibannya sebagai penerus perjuangan Islam, serta berbangsa dan bernegara.

Menjadi seorang santri tidak terlepas dari mencari informasi yang lebih berlaku memperluas informasi tentang agama Islam. Juga masuk akal untuk mencari informasi Ungkapan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat:11, yang membaca dengan teliti:

*Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

#### b. Fungsi dan Peranan Pondok Pesantren

Fungsi didefinisikan sebagai semua aktivitas yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan suatu sistem. Menurut fungsi Ma'shum Pesantren mencakup tiga aspek fungsi, yaitu fungsi pendidikan (tarbawiyah), fungsi sosial (ijtimaiyyah), fungsi keagamaan



(diniyyah).<sup>27</sup> Fungsi pondok pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sebagai Lembaga Edukasi atau Pendidikan

Kapasitas pelatihan dapat dimanfaatkan sebagai pengaturan dalam mendeklarasikan dakwah, sedangkan dakwah dapat dimanfaatkan sebagai metode untuk membangun sistem persekolahan. Kapasitas instruktif atau Pelatihan live-in school Islami benar-benar untuk menanggung misi dakwah. Menghadirkan meramaikan misi dakwah Islamiyah sistem sekolah.

Sejauh pengajaran, pesantren memilah-milah sekolah instruksi formal (madrasah, sekolah yang didanai negara, dan perguruan tinggi), dan pelatihan instruksi formal yang secara eksplisit menunjukkan agama yang sangat mengesankan dipengaruhi oleh pertimbangan peneliti fiqh, hadits, pemahaman, tauhid, dan tasawuf, bahasa arab, (nahwu, sharaf, balaqhod, dan tajwid), akal dan moral.

Sebagai landasan edukatif, sekolah Islam semua inklusif juga berwawasan menuju program ilmiah negara secara keseluruhan, sementara secara eksplisit pesantren bertanggung jawab untuk praktik ketat (Islam). Dari Mulai dari sini, pesantren memilih modelnya sendiri yang dirasa mendukung sepenuhnya kapasitasnya di bidang persekolahan dan manusia itu sendiri, atau setidaknya,

---

<sup>27</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Cirapas Jakarta, Penerbit Erlangga, 2005), 22.

untuk menjebak seorang penyembah sejati yang memiliki sifat-sifat tegak dan ilmiah yang tinggi.

b) Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai organisasi sosial, pesantren berusaha untuk melakukan pendekatan area lokal. Penghuni pentren telah dipersiapkan untuk maju untuk bantuan pemerintah masyarakat, sehingga hubungan yang menyenangkan ditata antara santri dan masyarakat sekitar. Wahid Zaeni menekankan bahwa meskipun sebagai organisasi edukatif bagi pesantren sekaligus sebagai yayasan pelatihan etika dan budaya baik antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan area lokal. Posisi ini membuat gerakan bahwa eksekusi hak-hak sipil melalui sekolah live-in Islam menggunakan lebih banyak metodologi sosial.<sup>28</sup>

Sebagian santri yang akan datang sengaja datang ke pesantren untuk menyerahkan dirinya kepada kiai dan pesantren, serta sejumlah besar wali mengirim anak-anak mereka ke sekolah pengalaman hidup untuk benar-benar fokus, karena mereka menerima bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan kiai akan menipunya, bahkan Kemudian lagi, mereka merasa bahwa dengan pemberian kiai, anak muda itu akan berubah menjadi individu yang hebat nantinya. Selain itu, adajuga banyak anak nakal yang memiliki

---

<sup>28</sup> Mujamil Qomar, Ibid, h.25

perilaku aneh dengan dikirim dari sekolah langsung oleh individu wali dengan harapan bahwa anak itu akan pulih dari kesalahannya.

Dari klarifikasi terkait dengan kapasitas sosial di atas, pesantren muncul sebagai mata air pengaturan, referensi dan elemen daerah serta organisasi (pembangunan) yang menggairahkan untuk kemajuan perbaikan daerah.

c) Sebagai Lembaga Penyiaran Dakwah

Kapasitas pesantren sebagai yayasan penyiaran dakwah (organisasi dakwah) harus dilihat dari kualitas dan komponen madrasah itu sendiri sebagai struktur fungsional yang dapat dimanfaatkan untuk latihan daerah. Latihan-latihan yang dikoordinir oleh pesantren menunjukkan bahwa kehadiran pesantren secara implisit membawa kegiatan-kegiatan positif bagi daerah, dengan alasan bahwa latihan-latihan yang dikoordinir oleh pihak pesantren, baik petisi jamaah maupun kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Islam (PHBI), menyebabkan masyarakat umum untuk mengenal lebih mendalam tentang ajaran Islam. pelajaran agama Islam untuk mereka pegang dan amalkan dalam rutinitas sehari-hari.<sup>29</sup>

c. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Menurut pandangannya, pesantren adalah efek samping dari bisnis kiai otonom yang dibantu oleh santri dan daerah setempat,

---

<sup>29</sup> Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 2001), 62.

sehingga mereka memiliki struktur yang berbeda. Arifin mengelompokkannya menjadi pesantren terdepan, sekolah pengalaman hidup tahassus (ilmu instrumen tahassus, fiqh/lushul fiqh, sains terjemahan/hadis, kajian tasawuf/tariqat, dan kajian qira'at Al-Qur'an) dan sekolah pengalaman hidup campuran.

Sementara itu, Dhofier memisahkan sekolah pengalaman hidup Islam menjadi dua klasifikasi, lebih spesifik: Pesantren Salafi dan Khalafi. Pesantren Salafi sebenarnya menginstruksikan mendidik buku-buku Islam tradisional sebagai pusat sekolahnya tanpa menghadirkan menampilkan informasi umum. Sedangkan sekolah pengalaman hidup khalifah memiliki ingat pelajaran umum untuk madrasah membuat atau membuka jenis sekolah yang didanai pemerintah di dalam iklim tinggal di sekolah.

Para pemerhati mencatat bahwa ada lima komponen normal ditemukan di setiap pondok pesantren, komponen-komponen ini adalah:

1) Kiai

Kiai selain pengajar dan pendidik juga bertanggung jawab tinggal di sekolah dewan. Kiai disebut saleh jika benar-benar paham, amalkan dan fatwa kitab kuning, jadilah kiai seperti itu contoh yang baik untuk siswa di setiap sekolah Islam live-in. Bagaimanapun, dalam pengaturan Kemajuan kiai pesantren harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Muhammad Tholchah

Hasan melihat kiai dari empat sisi, yaitu: inisiatif logis, keduniawian, sosial, dan organisasi.

## 2) Santri

Santri adalah siswa atau objek pelatihan, siswa Muslim adalah siswa yang berasal dari daerah yang jauh dan tinggal di sekolah pengalaman hidup Islam, siswa yang telah berada di sekolah pengalaman hidup Islam cukup lama biasanya menjadi perkumpulan yang berbeda dan memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan sehari-hari pesantren.

## 3) Masjid

Masjid adalah komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dengan pesantren, seorang kyai yang perlu menciptakan Pesantren biasanya pada awalnya akan membuat masjid yang terletak dekat dengan rumahnya. Masjid memiliki kapasitas ganda sebagai sekolah pengalaman hidup Islami, selain sebagai posisi permohonan dan cinta, itu juga posisi belajar, khususnya bagi pesantren yang benar-benar memanfaatkan strategi sorogan yang mengandung arti dorong, dengan teknik ini berarti siswa dapat menawarkan materi apa yang perlu dia sadari sehingga dia mendapat klarifikasi terperinci independen atau eksplisit dari kiai.

Juga, strategi wetonan (bandongan) dan itu berarti memperhatikan atau menyetel.<sup>30</sup>

#### 4) Asrama atau Pondok

Pondok atau pondok merupakan tempat tinggal para santri dan digunakan untuk mengulang ilustrasi yang telah disampaikan oleh kiai atau pendeta. Ki Hajar Dewantoro, sepenggal bangunan sekolah yang ditinggali itu merepresentasikan tempat kiyai sebagai inggarso sung tulodo (sebelum memberi teladan) atau oleh Al-Qur'an disinggung sebagai uswah hasanah (teladan sejati).

Pada dasarnya ada beberapa motivasi yang melatarbelakangi mengapa pesantren harus memberikan kabin (perempat) untuk rumah para siswa.

- a) Pertama, perbedaan seorang kyai dan wawasannya tentang Islam, adalah daya tarik para pelajar dari tempat terpencil untuk dapat menggali informasi dari kyai dengan gigih rentang waktu yang sangat lama. Jadi itulah gunanya seorang pemain pengganti harus tetap.
- b) Kedua, hampir semua pesantren berada di kota-kota yang jauh dari kelompok dan tidak dapat diaksesnya penginapan yang memadai mewajibkan para siswa, oleh karena itu diperlukan sekolah pengalaman hidup luar biasa.

---

<sup>30</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Ibid, 21.

##### 5) Pengajian Kitab-kitab

Pengajian pada umumnya memeriksa buku-buku Islam tradisional, buku-buku Islam, ini dikenal sebagai buku kuning di antara para siswa, karena disusun oleh peneliti masa lalu yang berisi metodologi, peraturan, dan berbagai jenis informasi ketat Islami dalam bahasa Arab.

Madrasah Islamiyah saat ini memiliki berbagai tingkatan, tingkat paling sederhana pesantren hanya menunjukkan membaca huruf Arab dan Al-Qur'an. Sementara itu, pesantren yang lebih tinggi derajatnya adalah pesantren yang menampilkan kitab-kitab yang berbeda, misalnya fiqh, kajian tentang keyakinan, dan amalan sufi, kebiasaan keilmuan pesantren baik sekarang maupun sekitar tidak seluruhnya dipatok oleh sebuah ternion mata pelajaran yang terdiri dari sesuai mazhab Syafi'i, ideologi sesuai dengan cara berpikir Islam. Asy'ari, dan amalan sufi dari karya Imam al-Ghazali.

Kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan konvensional atau sebaliknya mereka yang telah mengalami perubahan, memiliki dampak yang luar biasa keberadaan masyarakat Indonesia. Sekolah Islam semua inklusif sedang berkembang dan mengisi jumlah dan kualitas, khususnya di bidang pembangunan sistem persekolahan yang dibuat oleh pesantren dengan mengambil gaya pengajaran umum, membuat pesantren

lebih serius untuk menawarkan pengajaran kepada masyarakat umum.

#### **4. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan sebuah bentuk konseptual yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana teori memiliki korelasi dengan faktor permasalahan yang sudah dijelaskan.<sup>31</sup> Dalam kerangka berfikir ini peneliti akan berusaha menjelaskan masalah penting dalam penelitian tentang komunikasi pondok pesantren Madrosatul Qur'an Boyolali ditengah pandemi Covid-19. Dalam tahapan perencanaan sebuah kebijakan terdapat suatu proses yang dapat menentukan sejauh mana keberhasilan kebijakan yang dihasilkan, proses tersebut adalah perumusan komunikasi, dalam proses itu bisa diketahui bagaimana sebuah kebijakan dimulai, dimusyawarahkan, dikomunikasikan, dan dinegoisasikan.

Komunikasi yang dilakukan oleh pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali sebagai sebuah tindakan yang disusun dan dirancang harus mempunyai konsep dan proses yang jelas oleh seseorang, kelompok, dalam pondok tersebut. Kebijakan yang sudah dibuat ataupun disusun untuk mengatasi masalah berupa hambatan-hambatan yang terjadi, untuk kemudian dicari jalan keluar berupa peluang dalam rangka mencapai sasaran tujuan atau mengimplementasikannya.

---

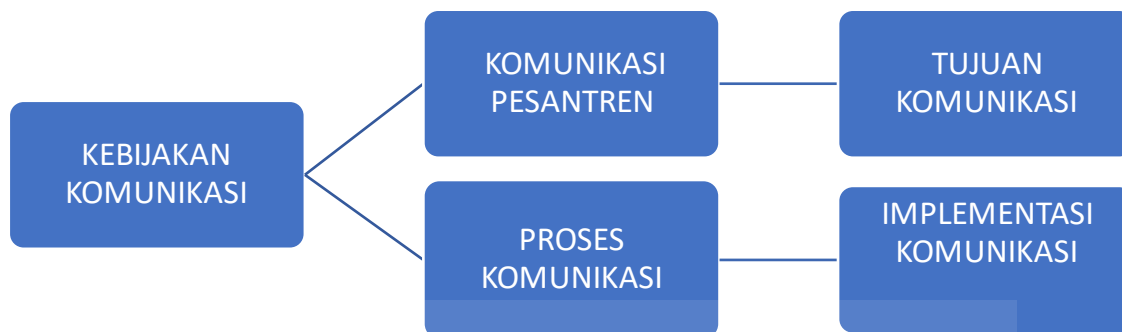
<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Management*. (Bandung: Alfabeta, 2003), 128.



Proses formulasi kebijakan inilah sebuah masalah di bahas untuk selanjutnya dicarikan sebuah alternatif pemecahan masalah sebaik mungkin. Jika alternatif dalam upaya pemecahan masalah sudah ditentukan selanjutnya dapat diimplementasikan secara hati-hati dan tetap melihat sejauh mana efektivitas kebijakan berjalan, ketika dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sudah tentu menemui kendala, kemudian kendala-kendala yang menghambat jalanya sebuah kebijakan lalu di evaluasi agar tujuan komunikasi berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Perumusan komunikasi sendiri atas dasar pertimbangan yang matang agar semua maksud dan tujuan terrealisasikan dengan tepat dan akurat, disini sebagai komunikator adalah pimpinan pondok pesantren (kiai) yang memiliki otoritas penuh terkait kebijakan yang sudah dibuat. Setelah kiai merumuskan sebuah kebijakan, selanjutnya dibahas dan dirapatkan oleh pengurus pondok pesantren tentang bagaimana nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua santri.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori kebijakan yang memiliki langkah-langkah maupun proses kebijakan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Agar lebih jelas dan mudah untuk difahami, peneliti akan mendeskripsikan dengan sebuah bagan dibawah ini.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan dan pasti dilalui secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Dalam pelaksanaan tentang “Komunikasi Pondok Pesantren di Tengah Pandemi Covid-19 di Boyolali” ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan jenis metode studi kasus.<sup>32</sup> Jenis pendekatan kualitatif deskriptif ini dipakai untuk mendeskripsikan maupun menganalisis fenomena sosial, aktivitas sosial, kondisi sosial, peristiwa, persepsi, keyakinan baik individual maupun kelompok sesuai realitas sosial yang ada.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-9, Jakarta : Kencana, 2017), 104.

<sup>33</sup> Sukmadinata Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 3.

Penelitian deskriptif pada hakikatnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual yang ada dilapangan secara rinci tentang bagaimana gejala maupun fenomena yang ada, memecahkan masalah, hingga membuat perbandingan serta evaluasi dalam sebuah kerangka penelitian. <sup>34</sup>Disini peneliti mampu mediskripsikan bagaimana permasalahan yang akan diteliti secara sistematis. Dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an di Tengah Pandemi Covid-19”

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek ataupun sasaran yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Madrosatul Qur’an Karangjoho Mojo Andong Boyolali yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi di pondok pesantren tersebut. Peneliti mengambil lokasi ini atas pertimbangan dan argument sebagai berikut:

- a. Perlu adanya kebijakan komunikasi pada pondok pesantren Madrosatul Qur’an pada situasi pandemi Covid-19 dikarenakan pondok pesantren sendiri identik dengan kebiasaan santri berkumpul/berkerumun. Dengan argumen tersebut maka sebuah kebijakan sangatlah penting dilakukan dan di implementasikan oleh pondok pesantren guna menekan penyebaran Covid-19.

---

<sup>34</sup> Jallaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya*, Edisi Revisi. (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2016), 68.

- b. Pondok pesantren sangat rawan dan berpotensi dapat menimbulkan klaster baru, mengingat santri berasal dari berbagai daerah oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pondok pesantren dalam membuat kebijakan serta dalam menerapkan standart protokol kesehatan di tengah pandemic Covid-19 ini.
- c. Pondok pesantren Madrosatul Qur'an dalam penerapan protokol kesehatan menurut peneliti sudah cukup ketat dan selektif dilihat dari semua regulasi yang sudah dilaksanakan oleh pondok tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat sejauh mana efektifitas kebijakan maupun implementasi di lapangan untuk selanjutnya bisa ketahui dimana letak kekurangan maupun factor-faktor yang mendukung dan menghambat sebuah komunikasi.

### 3. Sumber Data

Menurut Spradley dalam menetapkan sebuah sumber data menggunakan sebutan *social situation* sebagai sebuah cara untuk mendiskripsikan kelompok yang diteliti. situasi social (*social situation*) mencakup 3 faktor utama yaitu pelaku aktivitas (*actor*), peristiwa (*place*), seluruh aktifitas kegiatan yang dilakukan ataupun dilaksanakan (*activities*). Situasi social tersebut bisa dinyatakan sebagai objek penelitian yang akan dijelaskan dan dideskripsikan secara mendalam apa yang dilakukan didalamnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muri Yusuf, *Meode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* ( Jakarta: Kencana, 2017), 368.

Dalam menentukan sumber data peneliti memilih *purposive sampling* (sampel dengan mempertimbangkan tujuan terlebih dahulu sesuai kebutuhan penelitian). Peneliti dalam menentukan informan sangat selektif agar sebisa mungkin data yang dihasilkan akurat dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Jenis data yang dipakai dalam penelitian adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan didapatkan secara langsung dari informan atau subjek penelitian berupa wawancara ataupun gagasan individu maupun kelompok maupun hasil observasi kepada karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan output suatu pengujian. Data primer ini memiliki kelebihan yaitu data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat peneliti dilapangan. Peneliti memakai dan memprioritaskan data ini untuk memperoleh informasi secara langsung tentang Komunikasi di pondok pesantren Madrosatul Qur'an Boyolali.

Sumber data pada penelitian ini melibatkan beberapa pihak meliputi kiai, dewan asatidz, pengurus dan santri, yang dapat memeberikan informasi tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, informasi ini berkaitan dengan tindakan atau kata-kata yang memiliki relevansi tentang kebijakan di pondok pesantren.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah selesai dilakukan, dipakai sebagai pelengkap data penelitian yang sedang dihadapi. Dalam

penelitian ini data sekunder didapatkan dengan beragam cara seperti buku, artikel jurnal, tesis, kabar berita serta internet yang dapat menunjang sebuah penelitian.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode yang sangat pokok dipakai peneliti untuk mendapatkan data dilakukan dengan berbagai macam cara sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang sangat spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua terpenting adalah proses pengamatan maupun ingatan<sup>37</sup>.

Pendapat lain dari Sutrisno Hadi menerangkan bahwa pengamatan (Observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Sementara observasi partisipan adalah tehnik pengumpulan data amatanmelalui

---

<sup>36</sup>Dewi Sa'diah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 87.

<sup>37</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015),145

pengamatan terhadap objek, pengamatan dengan hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian pengamat benar-benar mengetahui kehidupan maupun aktivitas objek. Bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka<sup>38</sup>.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan serta mendokumentasikan perkembangan pendidikan, kegiatan dengan langsung datang ke tempat lokasi penelitian untuk kemudian melihat secara seksama bagaimana komunikasi yang dilakukan pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali ditengah pandemi Covid-19.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (interview guide). Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>39</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Burhan Bungin bahwasanya wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh informasi terkait data yang ada dilapangan dengan cara tatap muka (*face to face*) anatara

---

<sup>38</sup> Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 220

<sup>39</sup> J Lexy Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

pewawancara dan informan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Hal ini merupakan sebuah teknik informal dengan proses wawancara mengalir begitu saja.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas maka metode wawancara merupakan sebuah metode untuk mendapatkan data secara langsung kepada informan ataupun tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada maksud tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara terkait kebijakan komunikasi pesantren ditengah pandemi wabah Covid-19, peneliti menyiapkan pedoman wawancara berupa instrument pertanyaan yang diajukan kepada subjek atau informan. Dengan demikian peneliti dapat mendengarkan, mencatat wawancara secara terbuka dan mencakup informasi yang lebih luas.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang dilakukan peneliti ataupun penulis sebagai cara untuk menggali informasi berupa variable-variabel yang memiliki relevansi terhadap data yang diperlukan seperti foto, majalah, surat kabar untuk mempermudah jalannya penelitian.<sup>41</sup> Penegertian lain yang senada dijelaskan bahwa dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mengambil

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, 111.

<sup>41</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 123



data internal seperti sejarah, profil, maupun struktur organisasi<sup>42</sup>. Pendokumentasian pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data berupa tulisan, catatan, majalah, foto, arsip pondok pesantren Madrosatul Qur'an Andong Boyolali.

Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara menjadikan data lebih valid serta kredibel jika didukung dengan dokumen yang berhubungan dengan sikap personal maupun lembaga atau pondok pesantren itu sendiri. Teknik dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang ada dalam objek penelitian,

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data memiliki pengertian sebuah metode untuk memperoleh data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data sangat mudah untuk bisa difahami dan juga dapat memperoleh solusi dari setiap permasalahan tentang penelitian yang dilakukan. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moelong menjelaskan bahwa analisis data merupakan sebuah upaya yang diupayakan untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola yang penting lalu dipelajari untuk kemudian bisa memutuskan apa saja data yang diperlukan sebagai

---

<sup>42</sup> Achmad Sani Supriyanto dan Mashuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia* UIN (Malang: Maliki Press, 2010), 199-200.

bahan analisis<sup>43</sup>. Adapaun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data reduction*)

Data dari lapangan sangatlah kompleks dan beragam, Semakin lama sebuah penelitian maka data yang didapatkan semakin banyak dan rumit. Dengan banyaknya data yang diperoleh maka sebuah penelitian dapat merangkum ataupun meringkas dan memilih data yang sekiranya memiliki korelasi dan hal-hal yang sangat pokok sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian maka menjadi lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya<sup>44</sup>.

b. Penyajian Data (*Display Data*).

Penyajian data merupakan salah satu bentuk agenda dalam penelitian yang berfungsi sebagai alat untuk mempermudah memahami apa yang terjadi kemudian dapat digunakan sebagai analisis sesuai kebutuhan dan tujuan peneliti. Isi dari penyajian data biasanya berupa uraian singkat, grafik, matrik, bagan serta hubungan antar katagori dan sebagainya<sup>45</sup>.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*).

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu bentuk perumusan dari akhir sebuah penelitian yang dipaparkan dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta bisa di

---

<sup>43</sup>J Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D.*(Bandung: Alfabeta, 2015),247.

<sup>45</sup>*Ibid*, 249.

uji kebenarannya. Sederhananya, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah sesuai realitas dilapangan.<sup>46</sup> Kesimpulan inilah merupakan hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Sebuah kesimpulan bisa saja diragukan jika masih membutuhkan verifikasi.<sup>47</sup> Oleh sebab itu, triangulasi sangat penting dan dibutuhkan untuk memeriksa data (verifikasi) lebih jelas. Hal ini dilakukan terus menerus sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipercaya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis yang berjudul “**Komunikasi Pondok Pesantren Madrosatul Qur’an di Tengah Pandemi Covid-19 d**” adalah sebagai berikut:

**BAB 1** : Pendahuluan, merupakan bab yang sangat urgent karena menjadi acuan dalam penelitian. Bab ini membahas soal gambaran penelitian yang dilaksanakan serta rumusan masalah yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana biografi profil umum pondok pesantren Madrosatul Qur’an

---

<sup>46</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 68.

<sup>47</sup> Huberman dan Miles, *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publications, 1994), hlm 11-12.

**BAB III** : Dalam bab ini peneliti menyajikan data lapangan untuk kemudian semua data di analisis berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi maupun dalam implementasinya. Menjelaskan tentang analisis proses pembuatan kebijakan komunikasi, implementasi komunikasi, arah komunikasi, hambatan-hambatan dalam kebijakan komunikasi sesuai teori yang telah dipakai atau digunakan

**BAB IV** : Membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran untuk kemudian dilanjutkan dengan lampiran-lampiran

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi pondok pesantren Madrosatul Qur'an merupakan proses penyampaian pesan komunikator, baik kiai maupun ustadz/pengurus kepada komunikan santri melalui media komunikasi yang bertujuan menyampaikan komunikasi yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam rangka aktualisasi komunikasi dalam penyelenggaraan pembelajaran ditengah pandemi Covid-19.

Komunikasi pondok pesantren Madrosatul Qur'an dalam menghadapi pandemi Covid-19 disampaikan oleh pondok pesantren dengan media resmi melalui saluran komunikasi media online yang lebih cepat dan efektif. Dengan media online pihak pesantren menyampaikan protokol kesehatan yang ketat ketika memasuki pesantren, komunikasi pesantren juga terlihat dari tindakan wali santri dan santri yang mematuhi peraturan pondok.

Dalam mencapai sebuah komunikasi sudah tertuang pada juga visi/misi dan tujuan pondok pesantren Madrosatul Qur'an yaitu membentuk generasi Qur'ani dan berwawasan ahlussunah wal jamaah, mengembangkan minat dan bakat santri dan juga memberikan bekal kemandirian dalam kehidupan sehari-hari sedangkan tujuannya mencetak manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu, beramal dan berakhlakul karimah serta berhati ikhlas Dari visi, misi dan tujuan pondok pesantren Madrosatul Qur'an yang sudah dijelaskan diatas bisa dilihat

bahwa bentuk komunikasi dakwah sudah terlihat jelas dan dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Madrosatul Qur'an telah memberikan kebijakan secara baik berdasarkan hasil yang diharapkan. Komunikasi pesantren ditampilkan dalam bentuk hubungan ketaatan para santri dan wali santri terhadap setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren Madrosatul Qur'an.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka saran-saran sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pondok pesantren kaitannya dengan kebijakan komunikasi di tengah pandemic Covid-19 sebagai berikut:

- a. Pondok pesantren Madrosatul Qur'an merupakan salah satu pondok tahfidz yang masih melangsungkan sitem pembelajaran seacara langsung/tatap muka. Guna mengatasi kemungkinan pondok pesantren terdapat klaster baru, maka pondok pesantren harus dapat mempertahankan serta meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan protokal kesehatan agar resiko penularan virus Covid-19 dapat diatasi dengan baik sesuai standart protokol yang sudah ada. Karena jika terbukti pondok pesantren terdapat klaster baru, tidak menutup kemungkinan semua kegiatan pembelajaran lumpuh dan proses pembelajaran tidak bisa maksimal sebagaimana mestinya.
- b. Semua civitas pesantren harus memiliki kesadaran yang tinggi dan mampu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan tujuan

menghindari ancaman penularan virus Covid-19. Setidaknya pondok pesantren Madrosatul Qur'an mampu menjadi *role model* bagi pondok pesantren lain terkait penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abrar, Ana Nadya. 2008. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakikat dan Praktek*. Yogyakarta: Gava Media.
- Adiyatma, Muhammad Nur. 2020. *Internalisasi Nilai-Nilai Panca Jiwa Dalam Kehidupan Santri*. Tesis. UIN Malang.
- Agustino, Leo. 2006 *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. Ke-9. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W.N. 2003. *Public Policy Analysis: an introduction*. New Jersey: Pearson Education.
- Duun N., William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fajar Junaidi Dkk. 2020. *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Hancock, Alan. 1981. *Communication Planning for Development: An Operational Frame Work*. Paris :UNESCO.
- Huberman dan Miles. 1994. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Indra, Hasby. 2004. *Pesantren dan Transformasi Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komlesitas Global*. Jakarta: IRP Press.
- Khizanah, Lu'luatul dkk. 2020. *Ragam Ulas Kebencanaan "Pesantren dan Covid 19*. Yokjakarta: Budi Utama.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Masyhud, Sulthon dan Khusnurdilo, Moh. 2005. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muriah, Siti. 2000. *Metodologi Dakwah Kontemporer*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mustaqim, Abdul. 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press.



- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2007. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nogi, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI 2003.
- Nugroho, Nugroho. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholish, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, Riza Anggara. 2019. *Kebijakan Komunikasi Dakwah Lembaga Kursus Bahasa Inggris dan Arab Pare Kediri*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Cirapas Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Rahmat, Jallaludin. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rakatama Media.
- Sa'diah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Management*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Achmad Sani dan Machfudz, Mashuri. 2010. *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*. UIN Malang: Maliki Press.
- Syaodih, Sukmadinata Nana. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, Abdurrahman. 1985. *Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yacub. 2001. *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Angkasa.
- Yasmadi. 2002. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Ciputat Press.
- Yusuf, Muri. 2017. *Meode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zamakhsyari, Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. 2015. Jakarta : LP3ES.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Cet 1, Jakarta: P3M.

### Sumber Jurnal

Tamara, Jessica. *Strategi Pembelajaran Dosen Melalui Pemanfaatan Media Whatsapp di Masa Pandemi Covid-19* IAIN Curup Bengkulu, Jurnal At-Ta'lim Vol.19 No. 02.

Hakiemah, Ainun dan Sakhok, Jazilus. 2019. *Khataman al-Qur'an di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta: Kajian Living Hadis*. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol.9, No.1.

Wedi, Agus. 2019. *Khataman Qur'an Pra-Acara Alako Gebhai Desa Grujukan, Sumenep Media untuk Menangkal Bala' dan Memperoleh Berkah*. Hermeneutik: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol.13, No. 2.

Marantika, Nurhana. 2016. *Kebijakan Komunikasi di Madiun: Studi Kasus Pembentukan Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Madiun*. Jurnal Komunikasi ETTISAL, Vol. 1 No. 2.

Aritonang, Agusly Irawan. 2011. *Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Komunikasi, Vol. 1 No. 3 Juli.

Aziz, Abdu. 2017. *Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*, Artikel. Jurnal Tadris , Vol.12 No.2 Desember.

### Sumber Internet

Liputan6.com, "UNESCO: penutupan sekolah akibat covid-19 berdampak pada 290 juta pelajar di dunia". Daikses pada tanggal 17 November 2020 WIB, melalui laman <https://www.liputan6.com/health/read/4195275/unesco-penutupan-sekolah-akibat-covid-19-berdampak-pada-290-juta-pelajar-di-dunia>.

SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21.05 WIB, melalui laman.

Luh Devi Herliandry et al., 'Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19', JTP – Jurnal Teknologi Pendidikan 22, no. 1 (30 April 2021): 65–70, <https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>.

Anugrahana, Andri. 2021. *Hambatan, Solusi Dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar*, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 10, No. 3 (28 September) <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i3.p282-289>.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/08/kemenag-terbitkan-kurikulum-darurat-di-masapandemi-covid-19-bagi-jenjang-pendidikan-madrasah> diakses pada 20 Februari 2021

Bordoloi, R., Das, P., & Das, K. (2021). Perception towards online/blended learning at the time of Covid-19 pandemic: An academic analytics in the Indian context. *Asian Association of Open Universities Journal*, ahead-of-print(ahead-of-print), 1–20. <https://doi.org/10.1108/AAOUJ-09-2020-0079>

de Figueiredo, C. S., Sandre, P. C., Portugal, L. C. L., Mázala-de-Oliveira, T., da Silva Chagas, L., Raony, Í., Ferreira, E. S., Giestal-de-Araujo, E., dos Santos, A. A., & Bomfim, P. O.-S. (2021). Covid-19 pandemic impact on children and adolescents' mental health: Biological, environmental, and social factors. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 106, 110171. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.11.0171>

Camacho-Zuñiga, C., Pego, L., Escamilla, J., & Hosseini, S. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on students' feelings at high school, undergraduate, and postgraduate levels. *Heliyon*, 7(3), e06465. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06465>

Liputan6.com, "UNESCO: penutupan sekolah akibat covid-19 berdampak pada 290 juta pelajar di dunia". Daikses pada tanggal 17 November 2020 WIB, melalui laman <https://www.liputan6.com/health/read/4195275/unesco-penutupan-sekolah-akibat-covid-19-berdampak-pada-290-juta-pelajar-di-dunia>.

SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 21.05 WIB, melalui laman <https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/5baf1873d5766d3>